

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PENYANDANG DIFABEL DI
TROTOAR KHUSUS DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DHIMAS ADJI PRAYOGO
NPM : 13300019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PENYANDANG DIFABEL DI
TROTOAR KHUSUS DI KOTA SURABAYA
SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DHIMAS ADJI PRAYOGO
NPM : 13300019

SURABAYA, 25 JULI 2018

MENGESAHKAN,
DEKAN, PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.H.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PENYANDANG DIFABEL DI
TROTOAR KHUSUS DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DHIMAS ADJI PRAYOGO
NPM : 13300019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PENYANDANG DIFABEL DI
TROTOAR KHUSUS DI KOTA SURABAYA**

DIPERSIPKAN DAN DISUSUN

OLEH :
DHIMAS ADJI PRAYOGO
NPM: 13300019

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL AGUSTUS 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

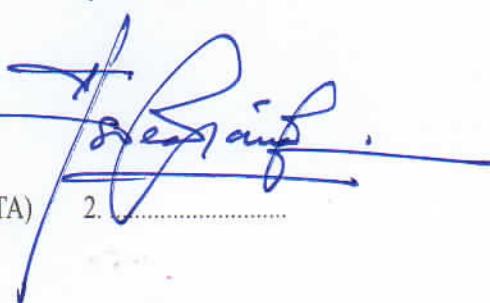
1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(KETUA)

✓ 

2. DR. SUHANDI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

 2.

3. DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

 3.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Penyandang Difabel Atas Hak-Hak Fasilitas Jalur Di Trotoar Khusus Di Kota Surabaya”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof.H.Sri Harmadji,dr.,Sp.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasih, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum universitas Wijaya Kusuma surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan yang telah selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

7. Sahabat saya Dhimas, Rifky, Lisa Black PINK, Riski, Padir yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman ,alumi terminal dukuh kupang, pasukan pulang pagi warung kopi Bondet,podmam Warung CMD dan yang selalu mendukung dan membantu saya selama proses penggerjaan skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DHIMAS ADJI PRAYOGO

NPM : 13300019

Alamat : Jl. Simorejo Gg. 16 No. 6, Surabaya

No. Telp. (HP) : 083831394007

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul: "Perlindungan Hukum Penyandang Difabel Atas Hak-Hak Fasilitas Jalur Di Trotoar Khusus Di Kota Surabaya", adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 JULI 2018

Yang Meny

DHIMAS ADJI PRAYOGO
NPM : 13300019



ABSTRACT

The study, entitled Legal Protection of Persons with Disabilities on the Rights of Path Facilities in Special Sidewalks in the City of Surabaya. This study aims to understand and analyze the legal protection of persons with disabilities and understand and analyze the government's efforts to fulfill the rights of persons with disabilities.

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method using the approach of legislation that is related and approaches to the elements, norms and opinions of experts (Statute Approach and Conceptual Approach.

Based on the results of the study, it can be concluded as follows: The Surabaya City Government as the Regional Organizer must endeavor to provide the necessary facilities and infrastructure and provide special accessibility in the form of service facilities for persons with disabilities. The Surabaya City Government as the policy holder as regional autonomy has an important role to fulfill the rights of persons with disabilities, this can be pursued by the creation of regional regulations that become the basis for the fulfillment of the rights of persons with disabilities. The regional regulation is intended as a legal umbrella for the obligation of the Surabaya City government in fulfilling the rights and needs of persons with disabilities so that the creation of a sense of security and comfort for persons with disabilities in enjoying public facilities and so that there is no discrimination that can cause social disparity between the general public and become a disabled person. Legal protection of persons with disabilities, namely persons with disabilities have the same rights as people who do not have special needs or are perfect in the field of public facilities. Preventive legal protection aims to prevent the occurrence of disputes in this case the occurrence of violations by the parties that befall the people. In this case, the government must be fast and responsive in fulfilling the rights of persons with disabilities, so that people with disabilities get a sense of comfort in using public facilities. Whereas repressive legal protection aims to resolve disputes over violations related to claims for violations

Keywords: *Legal Protection, Rights of Persons with Disabilities, Surabaya City*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Penyandang Disabel Atas Hak-Hak Fasilitas Jalur Di Trotoar Khusus Di Kota Surabaya. Dengan permasalahan Bagaimana upaya pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana perlindungan hukum penyandang disabilitas Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan unsur-unsur, norma-norma serta pendapat para ahli

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemerintah Kota Surabaya selaku Penyelenggara Daerah wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan aksesibilitas khusus berupa kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang kebijakan selaku otonomi daerah memiliki peran penting untuk terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, hal tersebut dapat diupayakan dengan dibuatnya peraturan daerah yang menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan daerah tersebut bertujuan sebagai payung hukum atas kewajiban pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas publik dan agar tidak terjadi diskriminasi yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat umum dan masyarakat yang menjadi penyandang disabilitas. Perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas mempunyai hak sama dengan orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus atau sempurna di bidang fasilitas publik. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa pada rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus cepat dan tanggap dalam pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas tersebut mendapatkan rasa nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran berkaitan dengan gugatan atas pelanggaran tersebut

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Penyandang Disabilitas, Kota Surabaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ASBTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian Hukum	6
C. Manfaat Penulisan Hukum	6
D. Kerangka Konseptual Hukum	6
1. Perlindungan Hukum	6
2. Penyandang Disabilitas dan Difabel	9
3. Kewajiban Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas	12
E. Metode Penulisan	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Bahan Hukum	14

3. Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Analisis Bahan Hukum	15
F. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II : UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	18
A. Faktor Terhadap Terpenuhinya Hak Penyandang Disabilitas	18
B. Upaya Pemerintah Kota Surabaya Untuk Memenuhi Kewajiban Penyandang Disabilitas	25
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS	32
A. Perlindungan Hukum yang Berkaitan dengan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	32
B. Kewajiban Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas	45
BAB IV : PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA